

**POLITIK KULTURAL
KH. ABDURRAHMAN WAHID
DALAM DEMOKRATISASI**



Dr. Subaidi qomar Msi.

POLITIK KULTURAL KH. ABDURRAHMAN WAHID DALAM DEMOKRATISASI

ISBN : 978-623-5578-21-7

Penyusun : Dr. Subaidi qomar Msi.
Editor : Dr. Effatul Afifah, SST.,RD., MPH
Layout & Ilustrasi : Anas Azwar
Cover : Anas Azwar
Penerbit : Alinea Media Dipantara
Alamat : Kavling Permata Beringin Blok G Nomor 12
Wonosari Ngaliyan Semarang Jawa Tengah
Telp. 082243813872
Halaman : viii + 318
Cetakan : 2024

SARAN DAN MASUKAN UNTUK PROSES PERBAIKAN
e-mail : redaksipustakabarupress@gmail.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

All rights reserved. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 72 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan barang atau hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Swt. Karena izin-Nyalah buku Politik Kultural KH Abdurrahman Wahid dalam Demokrasi ini dapat diselesaikan.

Buku Politik Kultural KH Abdurrahman Wahid dalam Demokrasi sebagai Kajian mengeksaminasi kiprah KH. Abdurrahman Wahid/ dalam demokratisasi di Indonesia.

Politics dapat dijadikan rute alternatif dalam pelebagaan demokrasi bagi negara yang memiliki kemajemukan seperti bangsa Indonesia. Kiprah KH Abdurrahman Wahid (GurDur) dapat dikenal sebagai bagian dari bentuk *cultural politics*, dan salah satu tokoh yang mengungkap proses demokratisasi dalam rute alternatif dengan mengambil inspirasi dari konsep *teori habitus* dan *doxa* yang ditawarkan Pierre Bourdieu. *Cultural politics* memperlihatkan bahwa demokratisasi sebagai ekspresi perlawanan seorang aktor (*agency*) yang berada dalam struktur kekuasaan melalui tindakan diskursif dan kontroversialnya dalam ruang demokrasi, dengan ranahkultural (*cultural fields*) dan ranah politik (*political fields*) menjadi ajang permainan (tempat berlangsungnya perjuangan dan strategi), dimana di dalamnya terdapat perebutan dan pertarungan berbagai modal (modal kultural, modal politik) dari para tokoh, elit politik di struktur kekuasaan dalam mengubah atau mempertahankan suatu *doxa*. Modal yang dimiliki menjadi penentu gaya permainan, keberhasilan atau kegagalan dalam perebutan dan pertukaran modal. Hal ini dapat dilihat dalam reproduksi pewacanaan yang dilakukan oleh Gus Dur dalam merubah *doxa*.

Dengan memperlihatkan bagaimana kiprah Gus Dur dalam menggalang perlawanan terhadap *doxa* dalam bentuk tindakan-tindakan unik dan kontroversial yang memiliki kapasitas provokasi mau tidak mau menghasilkan kontroversi, sebagai bentuk perlawanan terhadap *doxa*

dan juga sebagai pintu perubahan dalam membangun seperangkat nilai dan wacana dalam melawan dan mengcounter status quo dan dominasi praksis demokrasi yang proseduralistik.

Hal ini terlihat bahwa demokratisasi sebagai bentuk perlawanan dan perubahan suatu *doxa*. Dari telaah terhadap upaya Gus Dur untuk mengembangkan seperangkat sistem nilai dan pewacanaan yang dimaksudkan untuk medekonstruksi dan merekonstruksi wacana yang secara diam-diam telah menjadi perangkat struktural yang baku, terlihat bahwa Kontroversi pewacanaan yang diungkit ini justru memungkinkan sang aktor akan mampu mengungkap dan membongkar persoalan-persoalan yang selama ini tidak disadari.

Langkah-langkah kunci tersebut menggulirkan simpul-simpul perwacanaan di seputar hal yang dinilai sebagai pengekang proses demokratisasi secara heboh namun pada saat yang sama menjangkau hal yang lebih mendalam dibandingkan dengan cara-cara konvensional yang bersifat linear. Proses dekonstruksi dan rekonstruksi wacana melalui tindakan kontroversial aktor kunci itu, menjadikan transformasi nilai-nilai demokrasi telah berhasil dilakukan dalam; menginsiminasikan lahirnya oposisi formal, kesetaraan wanita dan pria dalam kepemimpinan politik, perubahan Papua dengan lahirnya undang-undang otonomi khusus, mencairnya hegemoni negara terhadap agama serta diterimanya warga China sebagai bagian dari bangsa ini. Walaupun sebagian kecil tindakan kontroversial aktor kunci ini tidak berhasil, seperti ide pencabutan tap MPRS no XXV/1966 dan tindakan merakyatnya dengan pakaian katok kolor di istana negara baik sebagai bentuk transformasi kelembagaan maupun sebagai bentuk protes dari arogansi mayoritas elite terhadap minoritas di parlemen.

Kepiawaian Gus Dur mereproduksi wacana tandingan yang dikemas sebagai bagian dari tindakan diskursif yang kontroversial dapat diketahui bahwa proses demokratisasi, dengan pewacanaan; (1) wacana humanisme, egalitarianisme dan keadilan sebagai modal kultural. (2) wacana kesadaran kultural: upaya menciptakan masyarakat demokratis, sebagai modal politik dalam sebuah ranah, diharapkan mampu mengubah

sistem demokrasi sebagai sebuah *doxa*, yang tejabak oleh pendekatan *agent centered* dan *structure centered*. Telaah terhadap bekerjanya secara simultan modal kultural dan modal politik dalam melakukan perlawanan dan perubahan *doxa* yang disajikan di dalam buku ini menunjukkan bahwa tindakan diskursif dan kontroversial, yang dilakukan oleh aktor dalam struktur kekuasaannya sebagai presiden, yang terlihat bukan hanya dinamis dan dialektinya tindakan diskursif yang kontrofer-sial melainkan kemampuannya membangun seperangkat system nilai dan pewacanaan. Dari pemahaman akan kedinamisan inilah Gur Dur memanfaatkan posisi strategis dan juga memerebutkan posisi-posisi strategis.

Dengan kesadaran akan posisinya ini bisa difahami adanya kekuatan tersendiri untuk melakukan perubahan namun dapat difahami juga bagaimana aktor strategis dapat medekonstruksi dan merekonstruksi nilai-nilai demokrasi yang sensitive kultur dengan cara; (1) membangun seperangkat nilai dan wacana dalam melawan status quo dan dominasi praksis demokrasi proseduralistik dan institusionalistik yang dominan. (*heterodoxy* dalam istilah Bourdieu). (2) memaknai kembali demokrasi dengan berpijak pada nilai-nilai budaya masyarakat yang komunalistik dan paternalistik, (2) mem-bergaining-kan tata nilai yang ada (nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai budaya lokal) sebagai pengembangan wacana tandingan yang dapat merebut perhatian publik dalam rangka membentuk sistem nilai-nilai demokrasi yang adaptable dalam konteks Indonesia.

Penjelasan tentang proses demokratisasi yang terekam dari analisis politik kultural tersebut di atas, studi ini menunjukkan bahwa teori demokrasi yang sedang menjadi mainstream acuan praktik pemerintahan selama ini memiliki sejumlah kelemahan dalam system demokrasi di Indonesia yang tidak terjelaskan secara proporsional adalah peran tokoh kunci. Teori transisi menuju demokrasi di satu sisi melebih-lebihkan kemampuan tokoh menciptakan perubahan kultural yang disebut demokratisasi (*heterodoxa*). Sementara itu kalangan strukturalis terlalu skeptis atau *understate* peranan dan kemampuan

tokoh kunci, dalam hal ini Presiden, dalam menciptakan perubahan, karena hanya strukturlah yang mampu membangun demokrasi dalam suatu negara. Memang, para aktor politik yang berada dalam posisi puncak hampir selalu menjadi variabel yang menentukan pola dan arah transisi demokrasi di setiap negara, setelah melalui proses liberalisasi. Tetapi tidak ada demokrasi yang terkonsolidasi tanpa dukungan tradisi atau budaya lokal, disamping nilai-nilai liberal. Teorisasi demokratisasi yang mampu mendialektiskan secara dinamis antara *agent centered* dan *structure centered*, yaitu teori demokratisasi politik kultural dimana peran seorang aktor (*agency*) yang berada dalam struktur kekuasaan, seperti presiden memiliki peran strategis dan signifikan yang tidak hanya dimungkinkan dapat melakukan suatu perubahan terhadap *doxa*, melainkan juga dapat membangun seperangkat sistem nilai demokrasi yang lebih sensitive terhadap kultur dan kontek lokal bangsa Indonesia yang mejemuk. Dengan demikian demokratisasi *cultural politics* merupakan demokrasi *tawassuthiyah* (demokrasi jala tengah) antara hegemoni-proseduralistik dan demokrasi yang memberikan kebebasan berekspresi yang dapat menimbulkan anarkhisme, antara *agent centered* dan *structure centered*.

Saya ucapkan banyak terima kasih pada para dosen besar Ilmu Politik, khususnya Prof. Dr. Mohtar Mas'ood MA., Prof. Dr. Purwo Santoso dan keluarga istri & anak-anak M. Yazi Zubaid, Moh Gilfaqu Nizar Zubaid, Moh Gilfaqu Eiza Ashif Zubaid Gilfaqu dan Zaim Asshaqofi Zubaid, Moh Bil Faq.

Semoga buku ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS.....	iii
DAFTAR ISI	vii

BAB I

MENELAAH POLITIK KULTURAL TOKOH DEMOKRATISASI.....	1
A. Perkembangan Demokratisasi	1
B. Ragam Demokrasi Perspektif.....	8
C. Metodologi Demokratisasi Melalui Politik Kultural	25

BAB 2

KH. ABDURRAHMAN WAHID: PANDANGAN HIDUP DAN NILAI-NILAI YANG DIJUNGJUNG TINGGI.....	41
A. Kontribusi Proses Demokrasi.....	41
B. Spesifikasi Ketokohan.....	43
C. Konsep Demokrasi dan Politik Kultural Dalam Pemikiran Gus Dur	49
D. Pluralisme, egalitarianisme dan Humanisme; Nilai-Nilai yang Dijunjung Tinggi oleh Gus Dur	59
E. <i>Cultural Values</i> dalam <i>Political Action</i>	72
F. Aktor Politik.....	107

BAB 3

MEMBUKA PINTU PERUBAHAN: PERTARUNGAN DISKURSUS KONTROVERSIAL DAN RESPONS PUBLIK.....	109
A. Tindakan Politik	109
B. Perubahan Habitus Dalam Ranah: sebuah pertarungan Modal	113
C. Kasus 1: Forum Demokrasi (FOR-DEM).....	114
D. Kasus 2: Kepemimpinan Perempuan	125
E. Kasus 3: Penamaan Papua untuk Irian Jaya	136
F. Kasus 4: Ide Komunisme dan Marxisme	150
G. Kasus 5: Pengakuan sebagai Keturunan China.....	164

H. Kasus 6: Tampil Dengan Celana Pendek di Depan Istana Negara.....	180
BAB 4	
REPRODUKSI SISTEM NILAI DALAM RUTE DEMOKRASI ALTERNATIF	193
A. Dekonstruksi dan Rekonstruksi Politik	193
B. Reproduksi Sistem Nilai Dalam Praktek Demokrasi.....	196
C. Pertarungan Wacana dalam Memperebutkan Makna melalui Modal Kultural dan Modal Politik.....	210
D. Peluang demokratisasi Politik Kultural Gus Dur.....	215
E. Konsep Demokratisasi Politik Kultural Tokoh; Sebuah Alternative dalam Pelembagaan demokrasi	218
F. Peranan Politik Kultural Dalam Praksis Demokratisasi di Indonesia.....	246
G. Paradoksi Demokratisasi ala Politik kultural: Antara Mitos dan Rasionalitas	257
H. Analisis Teori Bourdieu Dalam Pembacaannya terhadap Politik Kultural Gus Dur Dalam demokratisasi	260
BAB 5	
PERUBAHAN POLITIK.....	267
A. Politik Kultur.....	267
LAMPIRAN I.....	283
LAMPIRAN II	284
DAFTAR PUSTAKA.....	285
PROFIL PENULIS	305